

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi pada suatu negara karena pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuan dari pembangunan nasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara materil maupun spiritual sesuai dengan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, maka pembangunan yang ada di daerah termasuk dalam pembangunan nasional. Pemerintah daerah dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan di bidang ekonomi daerah guna mensejahterakan masyarakat daerah dan dapat berdampak positif bagi pembangunan nasional yang terus meningkat.

Sebagai wujud nyata komitmen terhadap otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sekaligus kemampuan politik untuk melakukan reformasi, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam rangka

memberi pelayanan, peningkatan peran, serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kunci keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dimasing-masing Pemerintah Daerah terletak pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam melakukan kelola keuangan yang baik seperti kemampuan untuk menjalankan kegiatan pembangunan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rencana pembangunan daerah yang dituangkan dalam bentuk angka. Hal ini disebabkan karena anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan segala urusan pemerintah diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilihat dari berbagai komponen penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Selanjutnya, Lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain hibah atau dana darurat dari pemerintah. (Widjaja, 2013:254)

Menurut Widjaja (2013:152) belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Permendagri No.59 Tahun 2007 menyatakan bahwa belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, masih banyak melakukan pembangunan nasional dan hal tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu bagian dari Indonesia yang masih terus berkembang dengan potensi alam yang sangat tinggi seperti timah, lada dan perkebunan sawit. Namun, sekarang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai berkurang sehingga pemerintah daerah harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal guna meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerah.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang strategis ditinjau dari geografis, pembangunan nasional dan pembangunan daerah serta

berfungsi sebagai pusat pengembangan pembangunan seperti Pusat Pemerintah dan Pemukiman Penduduk, Pusat Perdagangan dan Industri, Pusat Pelayanan Sosial, Pusat Administrasi Penambangan Timah dan Pusat Lembaga Keuangan. Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kota Pangkalpinang. Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang pada tahun 2015 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 196.202 orang dengan komposisi 100.617 laki-laki dan 95.585 perempuan. Pada tahun 2010 Kota Pangkalpinang terjadi pemekaran wilayah dari 5 kecamatan dan 36 kelurahan menjadi 7 kecamatan dan 42 kelurahan. Sedangkan pada Kabupaten Bangka terdiri dari 8 kecamatan dan 15 kelurahan dengan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2014 yaitu 305.158 jiwa dan Sungailiat sebagai ibukota dengan luas wilayah 2.950,68 KM². Pada tahun 2014, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bangka yakni penduduk laki-laki sebanyak 157.634 jiwa atau sekitar 51,66 persen dari seluruh penduduk dan penduduk perempuan sebanyak 147.524 jiwa atau 48,34 persen dari seluruh penduduk atau berbeda hanya sebesar 3,32 persen.

Kota Pangkalpinang terdapat instansi pemerintah yang mengatur keuangan kota yaitu Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang bertanggungjawab kepada Walikota mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang memiliki tugas penyelenggaraan fungsi berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan. Sedangkan di Kabupaten Bangka juga terdapat instansi pemerintah yang mengatur keuangan kabupaten berdasarkan Salinan Peraturan Bupati Bangka Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A Kabupaten Bangka, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan atau didelegasikan kepada Daerah.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Pangkalpinang yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.1 Data Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI
2012	584,142,711,403.00	586,524,654,015.98
2013	657,998,836,219.00	662,197,444,473.99
2014	763,679,230,449.51	745,888,134,815.09
2015	853,965,575,459.70	797,819,738,788.28
2016	1,033,494,072,282.70	978,370,757,245.07

Sumber : BAKUDA Kota Pangkalpinang, Data diolah Peneliti 2018

Tabel I.1 dapat dilihat bahwa Pendapatan tahun 2012 anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.584,142,711,403.00 dan terealisasikan sebesar Rp.586,524,654,015.98, dan terus meningkat setiap tahunnya. Sehingga pada Pendapatan tahun 2016 anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1,033,494,072,282.70 dan terealisasi sebesar Rp.978,370,757,245.07.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang

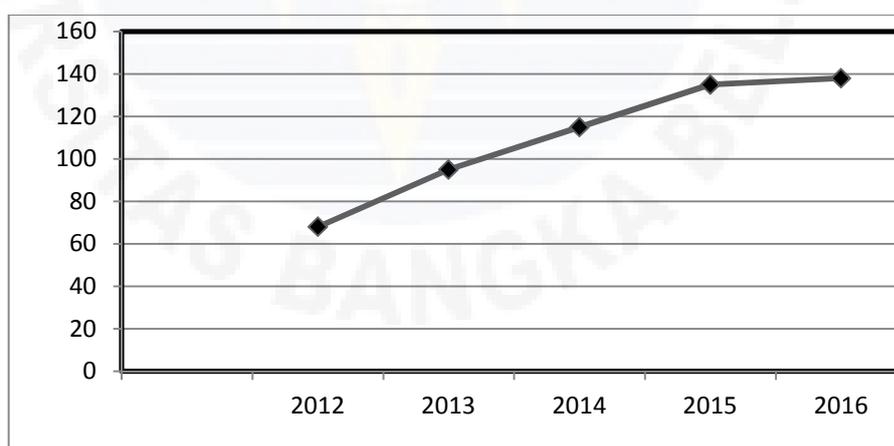
Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2012	67.616.225.250,49
2013	92.106.752.248,02
2014	110.985.684.657,11
2015	135.518.756.564,87
2016	136,257,398,973,11

Sumber : BAKUDA Kota Pangkalpinang, Data diolah Peneliti 2018

Tabel I.2 dilihat bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun terus mengalami pertumbuhan mulai dari tahun 2012 sebesar Rp.67.616.225.250,49 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp.136,257,398,973,11.

Agar terlihat lebih jelas dan mudah dipahami perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik I.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang



Sumber : BAKUDA Kota Pangkalpinang, Data diolah Peneliti 2018

Kota Pangkalpinang juga menerima bantuan dari Pemerintah Pusat berupa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi yang terdiri dari Dana Bagi

Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Jumlah dana tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.3 Data Pendapatan Transfer Pusat dan Provinsi Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2016

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI
2012	439,051,013,063.00	427,122,128,759.00
2013	470,485,379,674.00	469,708,594,566.00
2014	504,369,613,623.00	501,293,469,097.00
2015	574,789,879,854.00	538,208,270,454.00
2016	782,955,774,918.00	741,810,621,719.00

Sumber : BAKUDA Kota Pangkalpinang, Data diolah Peneliti 2018

Dapat dilihat tabel I.3 Pendapatan Transfer dari pusat dan provinsi kepada Kota Pangkalpinang tahun 2012 anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.439,051,013,063.00 dan direalisasikan sebesar Rp.427,122,128,759.00, dan terus meningkat setiap tahunnya. Sehingga Pendapatan Transfer dari pusat dan provinsi pada tahun 2016 anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.782,955,774,918.00 dan direalisasikan sebesar Rp.741,810,621,719.00.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Sudiarti selaku staf Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) bahwa masih adanya kendala dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti Pajak daerah, Retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah, karena beliau mengatakan bahwa target yang ditetapkan oleh pemerintah terlalu tinggi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban, pertumbuhan usaha di Kota Pangkalpinang sangat lemah, pemungutan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang maksimal, banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi tidak melaporkan kegiatan transaksi tersebut kepada petugas, pengaruh kondisi alam, dan kurangnya fasilitas yang memadai.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangka yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.4 Data Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI
2012	726.672.524.210,00	732.172.478.713,15
2013	836.185.507.600,00	810.680.873.771,07
2014	955.106.030.800,00	919.339.210.311,03
2015	1.057.168.007.250,00	1.073.846.681.219,90
2016	1.164.236.109.750,00	1.077.238.113.584,85

Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, Data diolah Peneliti 2018

Tabel I.4 dapat dilihat bahwa pada Pendapatan tahun 2012 anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.726.672.524.210,00 dan terealisasi sebesar Rp.732.172.478.713,15, dan terus meningkat sampai pada Pendapatan tahun 2016 anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.164.236.109.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.077.238.113.584,85.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.5 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka

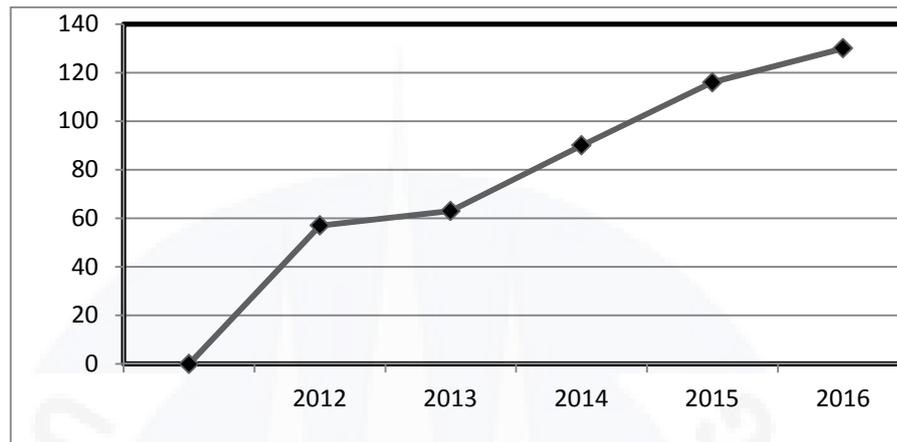
Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2012	56.066.033.738,72
2013	62.977.747.913,19
2014	89.113.748.853,54
2015	115.957.554.191,01
2016	129.059.621.690,70

Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, Data diolah Peneliti 2018

Tabel I.5 diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka mengalami peningkatan secara terus-menerus dari tahun 2012

sampai dengan tahun 2016. Agar terlihat lebih jelas dan mudah dipahami perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik I.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka



Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, Data diolah Peneliti 2018

Kabupaten Bangka juga mendapatkan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi berupa Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.6 Data Pendapatan Transfer Pusat dan Provinsi Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI
2012	569,166,687,000.00	579,442,589,802.00
2013	605,231,020,000.00	607,081,542,718.00
2014	683,099,100,000.00	681,876,307,255.00
2015	751,916,189,250.00	771,744,028,505.00
2016	862,508,878,000.00	826,499,466,310.00

Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka, Data diolah Peneliti 2018

Tabel I.6 dapat dilihat bahwa Pendapatan Transfer dari pusat dan provinsi kepada Kabupaten Bangka tahun 2012 anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp.569,166,687,000.00 dan direalisasikan sebesar Rp.579,442,589,802.00, dan terus meningkat setiap tahunnya. Sehingga Pendapatan Transfer dari pusat dan provinsi pada tahun 2016 anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 862,508,878,000.00 dan direalisasikan sebesar Rp. 826,499,466,310.00.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Rita selaku staf Tata Usaha Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka masih adanya kendala dalam merealisasikan target pendapatan daerah seperti terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, sarana dan prasarana belum sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap praktisnya birokrasi dan transparansi dalam pelayanan.

Cara untuk mengetahui tercapaiannya Pembangunan Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka dapat dilihat dari pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka melalui pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Selain itu, dengan menganalisis laporan keuangan suatu daerah dapat berguna sebagai alat pertanggungjawaban para pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas-tugas yang telah menjadi kewajibannya melaksanakan pembangunan daerah.

Fahmi (2012:1) mengatakan bahwa Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu daerah telah melaksanakan

dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar sesuai standar ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun rasio keuangan pemerintah yang dapat menilai kinerja keuangan pemerintah tersebut yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian.

Menurut Halim dan Kusufi (2013) bahwa rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Sedangkan rasio efektifitas pendapatan asli daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensial daerah tersebut dan rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (Operasi) dan Belanja pembangunan (Modal) secara optimal. Dengan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal suatu daerah dapat menunjukkan

derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah.

Maka dari itu berdasarkan permasalahan dan fenomena yang tertuang pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan kinerja keuangan pada pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dari tahun 2012-2016 yang peneliti tuangkan dalam penelitian yang berjudul “ **Studi Komparatif Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang Dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016** ”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dibuat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal?
3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka jika dilihat dari Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah?
4. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah?
5. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka jika dilihat dari Rasio Keserasian?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus, terarah dan tidak meluas, maka peneliti membatasi permasalahan pada “Studi Komparatif Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tahun 2012-2016” dimana pengambilan data hanya pada Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkalpinang dan Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui :

1. Kinerja keuangan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Kinerja keuangan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.
3. Kinerja keuangan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka jika dilihat dari Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah.
4. Kinerja keuangan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
5. Kinerja keuangan Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka jika dilihat dari Rasio Keserasian.

1.5 Manfaat Penelitian

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini, serta membuka kemungkinan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang sejenis.

a. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang relevan, khususnya teori mengenai keuangan daerah.
- 2) Dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah selama periode yang ditentukan.

b. Bagi Objek Penelitian

- 1) Dapat memberikan sumbangan pikiran didalam menentukan kebijakan pengelolaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 2) Dapat menjadi referensi pemerintah dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Pemerintah Kabupaten Bangka.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa di Universitas Bangka Belitung.

2. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan selanjutnya.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran secara ringkas mengenai penelitian ini, maka sistem penulisannya dibagi kedalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori manajemen yang digunakan peneliti terdahulu, teori mengenai keuangan daerah, dan teori yang mendukung pemecahan masalah yang ada serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan skala ukuran variabel serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan kondisi rasio keuangan daerah pada Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka serta memberikan

penjelasan tentang hasil studi komparatif data yang diperoleh oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian dan saran untuk pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

